

**RANCANGAN AKHIR
RENJA
TAHUN 2023**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat -Nya, Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan DKP lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Oktober 2022

**PI. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**



Dr. Hj. SURYA SUHERSI, M.Pd.

PEMBINA TK.I

NIP. 19650224 199703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN	36
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	36
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
V. PENUTUP	42

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah, hingga tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata diseluruh wilayah sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi, dengan penerapan teknologi inovatif. Dalam penyediaan produksi pangan nasional sebagian besar dilakukan oleh petani/masyarakat miskin dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Kebutuhan Pangan mensarikan bahwa kebutuhan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan untuk membentuk manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui tercukupinya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam, ada tersebar merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian kedua pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Sesuai dengan uraian diatas dan mengingat pentingnya peningkatan ketahanan pangan maka pemerintah Kabupaten Bengkalis merasa perlu untuk membentuk OPD khusus yang menangani tentang ketahanan pangan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, yang diantaranya berisi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap OPD untuk menyusun dan memiliki Renja OPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatarbelakang amanat dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melaksanakan proses penyusunan Renja Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis;
24. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/BAPPEDA-PPE/I36/2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. **Rencana Kerja ini disusun dengan maksud :**
 - a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis selama satu tahun ke depan;
 - b) Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada bidang ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkalis;

- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

2. **Penyusunan Rencana Kerja DKP Kabupaten Bengkalis, bertujuan untuk:**

- a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis;
- b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis;
- c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Rencana kerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2023. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan **tugas pokok** dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Bengkalis, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Rencana Kerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,**
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,**
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**
- 3.3. Program dan Kegiatan**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP,

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Renstra SKPD

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tahun 2021 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 yang menjelaskan bahwa dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku seluruhnya berjumlah Rp. 10.864.304.536,00- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Kegiatan : Rp. 5.834.525.911,00.-
- Belanja Pegawai : Rp. 5.029.778.625,00.-

Adapun rincian realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2.1.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Gaji dan Tunjangan	2.391.685.453,00	2.169.175.283,00	90.70
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.638.092.872,00	2.394.475.691,00	90.77
TOTAL		5.029.778.325,00	4.563.650.974,00	90.73

Dari tabel 2.1 diatas, perlu disampaikan bahwa untuk gaji dan tunjangan, Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan Tambahan Penghasilan

Pegawai,terdapat sisa anggaran sehingga realisasinya tidak masih terdapat kelebihan anggaran, Hal ini disebabkan anggaran gaji memang dicadangkan berlebih, untuk mengantisipasi bila terjadinya mutasi atau pengangkatan pegawai baru yang masuk ke DKP pada pertengahan tahun anggaran. Adapun realisasi fisiknya telah mencapai **100** persen.

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten menyusun dan menetapkan program dan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah, dimana dalam tahun anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

Adapun rincian realisasi Belanja Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat terlihat sebagai berikut :

I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah
2.2	Adminnistrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD
4.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
5.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi SKPD

6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
1	Pengadaan Mebel
2	Pengadaan Sarana dan prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Saranan dan prasanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
III	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
4	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
5	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota
3.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerKapitah/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ PerTahun
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
IV	Program Penanganan Kerawanan Pangan
4.4	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
V	Program Pengawasan Keamanan Pangan
5.5	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian proqram Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Doukumen Yang dihasilkan	Dokumen	12	2	2	2	100	-
		Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	72	12	12	12	100	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								

					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Orang	48	8	8	8	100				-
					Administrasi Umum Perangkat Daerah											
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengerti peraturan dan perundang-undangan	Bulan	72	12	12	12	100				
					Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor	bulan	72	12	12	12	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan; Item	72; 360	12;10	12;10	12;10	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Alat Rumah Tangga Kantor	Item	18	3	3	3	100				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang disediakan makan dan minum dalam 1 Tahun	Orang; Tahun	3762; 1	627; 1	627; 1	627; 1	100				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak	Item	60	10	10	10	100				
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Item	13	3	3	3	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	72	12	12	12	100				

				Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dilakukan pengenalan pangan lokal ; - Jumlah Individu yang melakukan Pelatihan Pengembangan Pangan; - Jumlah desa yang melaksanakan Rumah Pangan Lestari	Sekolah	29	2	2	2	100				
						Orang	100								
						Desa	11								
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SKPG	Laporan	6	1	1	1	100				
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	umlah Kecamatan yang melakukan pengujian Mutu dan Keamanan PSAT; - jumlah pertemuan/bimtek keamanan pangan	Kecamatan	66	11	11	11	100				

Pada Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan memiliki Pagu Keseluruhan Sebesar Rp.10.864.304.536,00 (Sepuluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tigas ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Rp. 5.029.778.625,00 dan Belanja Kegiatan Rp. 5.834.525.911,00 Belanja Langsung digunakan untuk 1 urusan wajib dengan 5 Program dan 33 Sub Kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan ke IV, memuat kompilasi pelaksanaan hasil Evaluasi Renja PD 2021 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut :



**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 6

No.	Sasaran RPUD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Belanja (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggung									
						6			7		8		9		10						11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		14.061.482.772,00	-	7.732.037.195,00	8.822.776.728,00	1.434.058.870,00	1.627.216.296,00	1.712.628.154,00	2.863.555,34	-	7.837.798.794,00	-	15.389.795.939,00	-	106,15	Dinas Ketahanan Pangan										
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	81.808.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		01.2.01.01.	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	4 Dokumen	188.950.000,00	-	81.808.000,00	0	0	0	0	0	1	28.564.000,00	1	32.044.000,00	2,00	61.808.000,00	61.808.000,00	32,61								
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	4.909.931.817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang bersede selama 1 Tahun	-	-	4.909.931.817,00	3 Bulan	837.466.787,00	3 Bulan	1.120.440,31	3 Bulan	1.239.138,11	3 Bulan	1.366.605,76	12,00	4.563.850.374,00	4.563.850.374,00	-	-									
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	153.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	324	1.236.430.550,00	8	153.800.000,00	0 Orang	36.400.000,00	0 Orang	25.600.000,00	0 Orang	60.289.000,00	8 Orang	29.311.000,00	8,00	153.800.000,00	1.380.030.550,00	-	117,30								
		01.2.05.	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah		-	-	114.610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		01.2.05.11.	Bidangan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mendapat peraturan Perundang-undangan	60	447.210.800,00	15	114.610.000,00	5 Orang	22.800.000,00	4 Orang	18.320.000,00	1 Orang	4.715.000,00	2 Orang	10.515.798,00	12,00	57.350.798,00	504.561.598,00	-	38,64								
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	1.271.767.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

KABUPATEN BENGKALIS

No.	Desain RUPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Laku (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021	Perangkat Daerah Perangkat					
								I		II		III		IV										
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 12		15 = 14/6 x 100%	(16)
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi	72 Bulan	619.440.000,00	60	233.483.690,00	12 Bulan	69.812.000,00	3 Bulan	8.860.000,00	3 Bulan	4.523.000,00	3 Bulan	10.968.000,00	3 Bulan	45.252.000,00	12,00	69.723.900,00	303.296.490,00	48,95		
		01.2.06.02.	Penyediaan Perakitan dan Perangklapan Kantor	Jumlah Tersedianya alat tulis dan alat kebersihan kantor	-	-	-	12 Bulan	195.000.000,00	3 Bulan	29.363.700,00	3 Bulan	14.196.000,00	3 Bulan	51.621.000,00	3 Bulan	90.511.000,00	12,00	194.891.700,00	194.891.700,00	-	-		
		01.2.06.03.	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Perakitan Rumah Tangga	-	-	-	3 Item	58.834.000,00	3 Item	58.834.000,00	0 Item	0,00	0 Item	0,00	0 Item	0,00	3,00	58.834.000,00	58.834.000,00	-	-		
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman kantor Dinas	6 Tahun	213.130.000,00	103	483.120.000,00	1 Tahun	90.950.000,00	0 Tahun	25.350.000,00	0 Tahun	8.450.000,00	0 Tahun	25.350.000,00	1 Tahun	30.800.000,00	1,00	92.950.000,00	496.070.000,00	232,75		
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	1 Tahun	167.867.500,00	0 Tahun	9.959.800,00	0 Tahun	20.577.600,00	0 Tahun	36.963.900,00	1 Tahun	97.394.400,00	1,00	164.895.700,00	164.895.700,00	-	-		
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi kegiatan dalam 1 tahun	3 Item Opiah	471.242.772,00	15	198.048.000,00	3 Item	38.000.000,00	0 Item	9.000.000,00	0 Item	6.000.000,00	0 Item	9.000.000,00	3 Item	12.000.000,00	3,00	38.000.000,00	232.048.000,00	48,24		
		01.2.06.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada 1 tahun	6 Tahun	3.900.000.000,00	27	3.595.844.785,00	1 Tahun	851.384.000,00	0 Tahun	87.250.000,00	0 Tahun	174.661.887,00	0 Tahun	66.485.600,00	1 Tahun	321.889.000,00	1,00	850.288.487,00	4.155.931.252,00	106,56		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-		248.860.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	-	1.221.020.000,00	-	-	20 Unit	52.875.000,00	20 Unit	51.750.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	20,00	51.750.000,00	51.750.000,00	-	4,24	
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perangklapan gedung kantor yang terpenuhi	-	2.225.290.000,00	-	-	12 Item	195.985.000,00	3 Item	45.021.000,00	0 Item	0,00	7 Item	27.032.000,00	3 Item	1.504.000,00	12,00	73.567.000,00	73.567.000,00	-	3,31	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-		375.088.611,00	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
		01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Jasa Administrasi	22867 Buah	548.300.000,00	17750	381.688.000,00	2200 Buah; 3 Orang	77.700.000,00	330 Buah	17.100.000,00	330 Buah	18.700.000,00	100 Buah	9.490.000,00	1440 Buah; 3 Orang	36.810.000,00	2.200,00	83.190.000,00	384.788.000,00	78,17		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Belah dan jaringan komunikasi kantor	-	1.178.500.000,00	324	1.238.438.590,00	12 Bulan	258.988.611,00	3 Bulan	52.717.584,00	3 Bulan	43.407.633,00	3 Bulan	31.226.667,00	3 Bulan	91.935.229,00	12,00	219.286.913,00	1.446.717.463,00	-	123,51	

No.	Sesaran RUPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021	Perangkat Daerah Perangkat						
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	(16)	
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor		584.220.000,00	7	182.000.000,00	2	38.400.000,00	0 Orang	9.600.000,00	0 Orang	3.200.000,00	0 Orang	4.800.000,00	2 Orang	6.400.000,00	2,00	24.000.000,00		218.000.000,00	-	38,11	
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Slaye Pemeliharaan dan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah PKG/TNKB dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	5 Unit	185.880.000,00	1 Unit	24.500.000,00	0 Unit	58.900.925,00	1 Unit	29.545.075,00	3 Unit	72.738.070,00	5,00	185.877.870,00		185.877.870,00	-	-		
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Slaye Pemeliharaan, Pejak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah PKG/TNKB dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		-	-	1 Unit	53.080.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	42.948.026,00	0 Unit	3.950.000,00	0 Unit	5.662.106,00	1,00	51.530.142,00		51.530.142,00	-	-		
		01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga labersihan kantor		-	-	12 Bulan	249.800.000,00	3 Bulan	62.400.000,00	3 Bulan	41.600.000,00	3 Bulan	34.364.000,00	3 Bulan	111.236.000,00	12,00	249.800.000,00		249.800.000,00	-	-		
		01.2.08.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan berkala Perencanaan dan gedung kantor		-	-	12 Bulan	388.973.000,00	3 Bulan	43.876.000,00	3 Bulan	23.858.000,00	3 Bulan	40.306.000,00	3 Bulan	487.857.000,00	12,00	595.857.000,00		595.857.000,00	-	-		
Total Rate-Rate Capaian Kinerja per Program (%)								30,75	34,92	49,55	16,03	77,50	58,88	99,00	35,99	99,00	93,82			0,00	43,10				
Predikat Kinerja Program								Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Tinggi	Sangat Baik	Sangat Tinggi	Sangat Baik	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Baik	Sangat Baik				
		02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			-	-	-	799.588.000,00		11.823.000,00		46.538.000,00		322.229.000,00		467.728.000,00	-	948.318.000,00		948.318.000,00	-	-		Dinas Ketahanan Pangan
		02.2.01.01.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan		-	-	2 Unit	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0 Unit	299.772.000,00	2 Unit	400.228.000,00	2,00	700.000.000,00		700.000.000,00	-	-		
		02.2.01.03.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah dana teknis		-	-	2 Desa	99.588.000,00	0 Desa	11.823.000,00	0 Desa	46.538.000,00	0 Desa	22.457.000,00	2 Desa	67.500.000,00	2,00	148.318.000,00		148.318.000,00	-	-		

No.	Desain RUPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Laku (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021	Perangkat Daerah Perangkat				
								I		II		III		IV									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	5,94	10,00	23,37	62,50	32,69	100,00	62,48	100,00	124,48			0,00	0,00	(16)	
Predikat Kinerja Program								Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
02.			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.887.417.100,00	80.928.500,00		316.619.000,00		475.138.700,00		605.278.700,00		1.477.964.900,00		1.477.964.900,00				Dinas Ketahanan Pangan	
02.2.01.01.			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Laporan NEM			170.000.000,00	0	34.170.000,00	0	25.826.000,00	0	29.990.000,00	1	76.950.000,00	1,00	163.938.000,00		163.938.000,00				
02.2.01.02.			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Demplot Penanaman Lahan Perairangan, Jumlah Desa yang melaksanakan Ruraah Pangan Lestari			276.789.600,00	0	6.658.500,00	0	171.282.000,00	0	14.200.900,00	2	80.899.000,00	2,00	273.040.400,00		273.040.400,00				
02.2.01.04.			Pemberaan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Pemberaan Harga Pangan			120.000.000,00	0	34.070.000,00	0	8.690.000,00	0	12.070.000,00	1	60.360.000,00	1,00	115.190.000,00		115.190.000,00				
02.2.01.05.			Pengembangan Kalendaran dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kecamatan Yang di Lakukan monitoring dan Evaluasi			50.000.000,00	2	9.030.000,00	1	4.140.000,00	4	21.850.000,00	4	14.690.000,00	11,00	48.710.000,00		48.710.000,00				
02.2.01.06.			Pengembangan Kalendaran Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Kabupaten Bengkulu	Jumlah Sosialisasi Toko Tani Indonesia Kabupaten Bengkulu			110.747.500,00	0	0,00	0	3.345.000,00	0	34.050.000,00	1	71.297.500,00	1,00	108.892.500,00		108.892.500,00				
02.2.02.01.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Kabupaten/Kota			120.000.000,00	0	0,00	0	24.080.000,00	0	2.500.000,00	1	55.790.000,00	1,00	82.370.000,00		82.370.000,00				
02.2.02.05.			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu			223.106.000,00	0 Kg	0,00	0 Kg	0,00	10 Ton	117.179.000,00	0 Ton	0,00	10,00	117.179.000,00		117.179.000,00				
02.2.04.01.			Perencanaan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	jumlah Tersedianya Laporan data analisis pola pangan harapan (PPH) Masyarakat Kabupaten Bengkulu			120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	61.967.000,00	1	57.292.000,00	1,00	119.259.000,00		119.259.000,00				

No.	Desain RUPD	KOOE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RHPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RHPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RHPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021	Peringkat Daerah Perangkat						
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		(16)
		03.2.04.02	Pembudayaan Masyarakat dalam Penggerakangan Koneksi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan Lomba Opta Menu B2SA/Festival Pangan Lokal Kabupaten/Jumlah sekolah yang dilat serikan gerakan penggerakan pangan lokal			1	476.774.000,00	0	0,00	0	79.256.000,00	1	181.331.800,00	0	188.000.000,00	1,00	448.588.800,00		448.588.800,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								7,78	7,47	18,89	14,70	67,78	37,95	100,00	29,14	100,00	89,25		0,00	0,00					
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				192.000.000,00		0,00		34.776.000,00		21.980.000,00		41.210.000,00		97.968.800,00		97.968.800,00		-	-		Dinas Ketahanan Pangan	
		04.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pelayanan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SKPD			192.000.000,00	0	0,00	0	34.776.000,00	0	21.980.000,00	1	41.210.000,00	1,00	97.968.800,00		97.968.800,00		-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	35,00	34,09	70,00	25,55	100,00	40,40	100,00	96,05			0,00	0,00				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				113.648.500,00		0,00		24.920.000,00		33.503.000,00		47.329.100,00		105.752.100,00		105.752.100,00		-	-		Dinas Ketahanan Pangan	
		05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Pemasaran Pangan Mula dan Keamanan Pangan Seger Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat untuk pengujian Keamanan Pangan (PSAT); Jumlah Kecamatan yang melakukan pengujian Keamanan Pangan PSAT			113.648.500,00	0	0,00	0	24.920.000,00	4	33.503.000,00	7	47.329.100,00	11,90	105.752.100,00		105.752.100,00		-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	25,00	21,93	70,00	39,48	100,00	41,64	100,00	93,05			0,00	0,00				
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)								7,71	7,66	27,69	22,02	69,56	35,70	99,80	43,93	99,80	99,20			-	8,60				
Predikat Kinerja OPD								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: 1. Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami penambahan pagu APBD Perubahan di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surti Menyurat (adanya perpindahan pagu dari tenaga supti menjadi tenaga administrasi) dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rehab plafon ruang aula dan pembangunan toilet di ruang Kabid Ketersediaan dan Kerawanan pangan dan Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan); 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Keadilan dan Kemendutan Pangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Kemendutan Pangan Lainnya mengalami penambahan pagu APBD Perubahan untuk Bantuan demplot cabe di Desa Pendelik.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: Adanya Rasionalisasi Anggaran dikarenakan dampak Covid 19																							

No.	Sasaran RUPD	KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021) 14 + 7 +13	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021 15 = 14/6 x 100%	Peringkat Daerah Perangung			
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14 + 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*):																		

*) Ditil oleh Kepala Bappeda

Diselesaikan,
Bengkalis, - Januari - 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkalis

H. IMAM HANIM, SP. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631112 199003 1 005

Dievaluasi,
Bengkalis, - Januari - 2022
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bengkalis

RINTO, SE. M. Si
Pembina
NIP. 19810601 200603 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

DKP Kabupaten Bengkalis sementara ini belum memiliki dokumen SPM yang berkenaan dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan, digunakan IKK dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian padatan pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan DKP Kabupaten Bengkalis.

Sebagai sebuah Instansi pemerintah, maka **tugas pokok** Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 adalah **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan** . Untuk menjalan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada table berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.

No	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Aalisis
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	115	125	135	145	155	128.22	176.351		
	Persentase peningkatan Jumlah Cadangan Pangan (%)	20 %	20 %	20%	20 %	20%	83.9	86.3		
	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	89	89.5	90	90.5	91	83.9	86.3		
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	BB	CC	B		
	Persentase Temuan Inspektorat/BKP yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Proses penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada ketahanan pangan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh Karena itu pada pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKP, antara lain :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama artinya perhitungan yang dilakukan untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan Pangan Utama (Beras) untuk memenuhi Kebutuhan Pangan suatu daerah baik dari pasokan dan dalam daerah.
2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengembangan Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi masalah pangan seperti kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kabupaten) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/Kn. 130/4/2018.
3. Peningkat Skor Pola Pangan Harapan, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik

dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SOPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap perubahan RKPD, hal ini terbukti bahwa semua program dan kegiatan yang diajukan masih diakomodir, walau terjadi rasionalisasi anggaran menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan daerah.

Tabel.2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bengkulu
Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikatr Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Kebutuhan Dana	Kebutu han Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.794.115.269					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			9.794.115.269					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.467.001.104					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Doukumen Yang dihasilkan	2 Dokumen	68.000.000					
a	Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.002.321.000					
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.002.321.000					
a	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			153.600.000					
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	8 Orang	153.600.000					
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			76.770.500					

3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengerti peraturan dan perundang-undangan	12 Bulan	76.770.500					
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.051.354.307					
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor	12 bulan	77.450.600					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan; 60 Item	160.350.300					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Alat Rumah Tangga Kantor	3 Item	52.575.000					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang disediakan makan dan minum dalam 1 Tahun	627 Orang; 1 Tahun	95.000.000					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak	10 Item	143.682.500					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	2 Item	36.000.000					
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	486.295.907					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.250.300					
	Pengadaan Mebel	umlah Mebel yang di sediakan	Unit	-					

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bagunan Gedung Kantor	10 Item	110.250.300					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.252.477					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi dan Materai serta Benda Pos Lainnya	4 Orang; 2200 Buah	102.456.000					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	263.596.477					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenga Supir Kantor	1 Orang	19.200.000					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			619.452.520					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	5 Unit	122.575.000					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	umlah Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	1 Unit	50.057.520					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	13 Orang	249.600.000					

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpeliharanya Sarana Prasarana Bangunan Kantor	12 bulan	197.220.000					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			495.776.496					
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			495.776.496					
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah terbangunya Lumbung Pangan dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan	1 Unit	353.000.000					
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kelompok yang dibina; Jumlah Alat dan Mesin Pengolah Mocaf dan Gayong	1 Unit	142.776.496					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.618.862.028					
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah			684.740.690					
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	170.000.000					
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Demplot yang dibina - Jumlah desa yang melaksanakan Pekarangan Pangan Lestari - Jumlah kelas Pelatihan Pemanfaatan pekarangan	2 Demplot; 40 Orang	150.000.000					

	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok	1 Laporan	136.768.690					
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Kecamatan yang Melakukan Kemitraan	11 Kecamatan	77.392.000					
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani yang tersedia	Kegiatan; Unit	150.580.000					
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			384.152.638					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	4 Pertemuan	142.000.000					
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	20 Ton	242.152.638					
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			549.968.700					
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	jumlah Laporan Data Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	133.750.000					
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kegiatan Lomba Cipta Menu; - Jumlah Sekolah yang dilakukan pengenalan pangan lokal ; - Jumlah Individu yang melakukan Pelatihan Pengembangan Pangan; 	Sekolah	416.218.700					
Orang									

	- Jumlah desa yang melaksanakan Rumah Pangan Lestari	Desa						
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			101.178.877					
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			101.178.877					
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	101.178.877	1 Laporan	101.178.877					
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			111.296.764					
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			111.296.764					
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	umlah Kecamatan yang melakukan pengujian Mutu dan Keamanan PSAT; - jumlah pertemuan/bimtek keamanan pangan	11 Kecamatan	111.296.764					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DKP Kabupaten Bengkalis menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, sosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Kabupaten Bengkalis. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Arah kebijakan umum kedauatan pangan dalam RPJMN adalah Pemantapan Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, menstabilkan harga pangan, mengamankannya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan pangan dengan pangan pangan baik demi meningkatkan kesejahteraan.. Oleh karena itu DKP Kabupaten Bengkalis mendukung kebijakan tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan yang ada.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis pada jangka waktu lima tahun.

Sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, dengan indikator sarasanya adalah :
 - ✓ Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)
2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Kota, dengan indikator sarasanya adalah :
 - ✓ Persentase Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan
3. Meningkatnya Pola Pangan Harapan, dengan indikator sasaran adalah :
 - ✓ Skor Pola Pangan Harapan

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA". Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021- 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- I. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
- II. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
- III. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dalam Visi tersebut memuat misi dan yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi dan visi misi Dinas Ketahanan Pangan adalah Misi kesatu, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 serta Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh SOPD sebagai upaya untuk mensinergikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program yang direncanakan dalam pelaksanaannya harus memberikan kontribusi terdapa upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik berupa personel (SDM), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa sumberdaya atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pada rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam tahun anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah
2. Adminnistrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengaman Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitas Saranan dan prasanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
10. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - d. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - e. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
11. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerKapitah/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/PerTahun
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
13. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
14. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2023 sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2022 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 sebagaimana terlampir.

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD 1.21.01 : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.139.148.130				10.425.066.139
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10.139.148.130				10.425.066.139
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.698.626.603				7.760.751.104
2.09.01.2.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.000.000				70.258.500
2.09.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Doukumen Yang dihasilkan		2 Dokumen	113.000.000			2 Dokumen	70.258.500
2.09.01.2.02.	Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.002.321.000				5.024.548.292
2.09.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bengkalis	12 Bulan	5.002.321.000	APBD	Rutin kantor	12 Bulan	5.024.548.292
2.09.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				153.600.000	APBD	Rutin kantor		153.600.000
2.09.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Bengkalis	8 Orang	153.600.000	APBD	Rutin kantor	8 Orang	153.600.000
2.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				136.395.999	APBD	Rutin kantor		93.287.000
2.09.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengerti peraturan dan perundang-undangan	Bengkalis	14 Orang	136.395.999	APBD	Rutin kantor	15 Orang	93.287.000
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.103.354.307	APBD	Rutin kantor		1.198.060.700
2.09.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor	Bengkalis	12 Bulan	77.450.600	APBD	Rutin kantor	12 Bulan	78.802.500
2.09.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bengkalis	60 Item	160.350.300	APBD	Rutin kantor	15 Item	163.650.000
2.09.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga Kantor	Bengkalis	3 Item	92.575.000	APBD	Rutin kantor	3 Item	50.000.000
2.09.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang disediakan makan dan minum dalam 1 Tahun	Bengkalis	627 Orang	95.000.000	APBD	Rutin kantor	684 Orang	95.000.000
2.09.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak	Bengkalis	10 Item	143.682.500	APBD	Rutin kantor	15 Item	144.658.200
2.09.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Bengkalis	2 Item	48.000.000	APBD	Rutin kantor	3 Majalah/Oplah	39.600.000
2.09.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bengkalis	12 Bulan	486.295.907	APBD	Rutin kantor	12 Bulan	626.350.000
2.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.250.300	APBD	Rutin kantor		208.755.000
2.09.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di sediakan	Bengkalis	-	75.000.000	APBD	Rutin kantor		93.750.000

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.09.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bagunan Gedung Kantor	Bengkalis	10 Item	110.250.300	APBD	Rutin kantor		115.005.000
2.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				385.252.477	APBD	Rutin kantor		388.282.942
2.09.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi dan Materai serta Benda Pos Lainnya	Bengkalis	3 Orang; 2350 Buah	102.456.000	APBD	Rutin kantor	3 Orang; 2350 Buah	102.850.500
2.09.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bengkalis	12 Bulan	263.596.477	APBD	Rutin kantor	12 Bulan	266.232.442
2.09.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenga Supir Kantor	Bengkalis	1 Orang	19.200.000	APBD	Rutin kantor	2 Orang	19.200.000
2.09.01.2.08.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				619.452.520	APBD	Rutin kantor		623.958.670
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	Bengkalis	5 Unit	122.575.000	APBD	Rutin kantor	5 Unit	125.800.000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	Bengkalis	1 Unit	50.057.520	APBD	Rutin kantor	1 Unit	51.058.670
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	Bengkalis	13 Orang	249.600.000	APBD	Rutin kantor	100%	249.600.000
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya Sarana Prasarana Bangunan Kantor	Bengkalis	100%	197.220.000	APBD	Rutin kantor	100%	197.500.000
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				495.776.496				502.120.910
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				495.776.496				502.120.910
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Terbangunya Lumbung Pangan dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan	Bengkalis	1 Unit	353.000.000	APBD		1 Unit	355.000.000
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Alat Olahan yang disediakan	Bengkalis	1 Unit	142.776.496	APBD		2 Desa	147.120.910
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.732.269.390			41 Unit	1.946.999.449
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				684.740.690			25 Unit	691.760.700
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	Bengkalis	1 Laporan	170.000.000	APBD		1 Laporan	170.000.000
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah Demplot yang dibina - Jumlah Individu yang melakukan Pelatihan Pengembangan Pangan	Bengkalis	1 Demplot 2 Desa	150.000.000	APBD		5 Demplot	150.000.000
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok	Bengkalis	1 Laporan	136.768.690	APBD		13 Laporan	138.768.700

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Kecamatan yang Melakukan Kemitraan	Bengkalis	11 Kecamatan	77.392.000	APBD		80.392.000	
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	-Jumlah Toko Tani yang tersedia	Bengkalis	1 Unit	150.580.000			152.600.000	
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				497.560.000			391.152.800	
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Bengkalis	4 Kegiatan	142.000.000	APBD	4 Kegiatan	145.000.000	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	Bengkalis	20 Ton	355.560.000	APBD	20 Ton	246.152.800	
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				549.968.700		Lanjutan	864.085.949	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Data Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	1 Laporan	133.750.000	APBD	Lanjutan 1 Laporan 1 Pertemuan	286.880.000	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	pengenalan pangan lokal ; Frekuensi Promosi Pangan Lokal - Jumlah Individu yang melakukan Pelatihan Pengembangan Pangan - Jumlah Desa yang melaksanakan Pengembangan Pangan Lestari (P2L)	Bengkalis	5 Sekolah 1 Bazar 2 Desa	416.218.700	APBD	Lanjutan	577.205.949	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				101.178.877			102.473.655	
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				101.178.877			102.473.655	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SKPG	Bengkalis	1 Laporan	101.178.877	APBD	Lanjutan 1 Laporan	102.473.655	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				111.296.764			112.721.021	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				111.296.764			112.721.021	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kecamatan yang melakukan pengujian Mutu dan Keamanan PSAT;	Bengkalis	11 Kecamatan	111.296.764	APBD	Lanjutan 11 Kecamatan	112.721.021	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					10.139.148.130				



PI. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS
Dr. H. SURYA SUHERSI, M.Pd.
PEMBINA TK.I
NIP. 19650224 199703 2 002